

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai kebijakan jalur sepeda yang ada di kota Surabaya. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah kota Surabaya tentang jalur sepeda di kota Surabaya merupakan bentuk tindakan pengurangan angka kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, selain itu pola lalu lintas di Surabaya pada umumnya lalu lintas campuran (*Mixed Traffic*) dimana seluruh jenis kendaraan bermotor maupun tidak bermotor bercampur menjadi satu yang mana hal ini dirasa pemerintah kota Surabaya kurang mengakomodir/ memberikan hak bagi pengguna sepeda di jalanan kota Surabaya. Serta sebagai perwujudan dari kota yang berwawasan lingkungan, Salah satu caranya adalah dengan pemilihan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan, yaitu sepeda. Dalam kebijakan jalur sepeda di kota Surabaya, masyarakat kota Surabaya khususnya para pengguna kendaraan bermotor menjadi terget sasaran kebijakan ini. diharapkan dengan adanya kebijakan ini masyarakat yang kesehariannya beraktifitas dengan menggunakan moda kendaraan bermotor beralih ke moda kendaraan angin (sepeda).

2. Berdasarkan analisis peneliti, kebijakan jalur sepeda yang diadakan di kota Surabaya masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- Tidak sesuainya implementasi kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan.
- Kurangnya kerja sama antara aktor yang terkait dalam kebijakan jalur sepeda yang mengakibatkan kurang adanya penyesuaian tugas dan kewenangan masing-masing aktor yang terkait.
- Target yang diintervensi dalam kebijakan jalur sepeda kurang sesuai dengan target yang direncanakan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya pengguna kendaraan bermotor dan minimnya pengguna sepeda di jalanan kota Surabaya.
- Dalam realisasi kebijakan jalur sepeda di kota Surabaya, aktor yang bertugas sebagai perencana geometrik jalan perkotaan (Dinas PU Bina Marga) tidak turut andil dalam kebijakan ini.
- Masyarakat kota Surabaya, belum bisa sepenuhnya merasakan manfaat dari kebijakan jalur sepeda, hal ini dikarenakan minimnya fasilitas serta aspek keamanan yang kurang memadai.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan penulis untuk pemerintah kota Surabaya dalam meneruskan kebijakan jalur sepeda pada tahap selanjutnya agar berjalan efektif adalah diperlukan kerja sama antara aktor yang terkait dalam kebijakan jalur sepeda seperti Dinas PU Bina Marga dan Dinas perhubungan agar dalam pemetaan konsep jalur sepeda dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan kota Surabaya, serta jalur sepeda yang akan dibangun di masa yang akan datang dibuat terintegrasi dari jalur umum, agar pengguna jalur sepeda merasa aman saat berkendara di jalur tersebut dan diperlukan fasilitas pendukung seperti pakir dan rambu khusus jalur sepeda.

